

Nama: Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia

NPM: 2012011029

Dosen Pengampu: - Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

-Widya Krulinasari, S.H., M.H.

KUIS HI 15 November 2021

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional!
= Hukum Internasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
 - a. Hukum perdata internasional: hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan hukum antar warga negara/ individu/badan hukum dari negara-negara yang berbeda;
 - b. Hukum public internasional: hukum internasional yang mengatur mengenai kepentingan public antara negara dengan subjek-subjek hukum lainnya yang satu dengan lainnya
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional!
= perbedaannya yaitu,
 - a. Sumber hukum yang berbeda (HI= hukum kebiasaan, perjanjian dan prinsip internasional yang lahir atas kehendak bersama negara dalam masyarakat internasional dan judicial decisions, HN= hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara)
 - b. Subjek yang berbeda (HI= negara, organisasi internasional, individu internasional, ICRC, Billigerent, Tahta suci Vatikan, HN= Individu dan badan hukum)
 - c. Kekuatan hukum yang berbeda (HI= bersifat mengatur hubungan negara secara horizontal, HN= memiliki kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna.)¹
3. Apakah perusahaan internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
= Dalam subjek hukum internasional, perusahaan internasional termasuk salah satu dari itu. Hal ini dikarenakan karena kekuatan ekonominya atau kadang-kadang kekuatan politiknya juga kebedaannya yang dapat diberbagai negara. Namun dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut berstatus swasta dan bukan berstatus sebagai legal person. Pada umumnya perusahaan tidak memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum internasional, namun dalam hal-hal tertentu, perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip hukum umum untuk transaksi dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara, atau disebut dengan internationalized contracts.²
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan!
= yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public adalah perwakilan dari negara tersebut seperti yang tertuang pada Art 14 paragraph 1 (c) VCLT.

¹ Boer Mauna, (2019). Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni hal. 12;

² *Ibid*, hal. 56;

-
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara, kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!
- = hal ini berkaitan dengan hubungan HN dengan HI, jika suatu negara menganut paham dualism, maka dalam praktiknya cenderung mengabaikan HI dan ketentuan HI memerlukan transformasi menjadi HN sebelum digunakan di lingkungan HN. Jika suatu negara menganut aliran Monoisme, jika itu monoisme primat nasional, maka hukum nasional yang didulukan dan jika itu monoisme primat internasional, maka HN dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dan harus tunduk pada HI. Dalam hal ini banyak juga negara yang memakai aliran dualism dalam menerapkan hukum perjanjian internasional dan menerapkan kedua paham tersebut tergantung kepada situasi yang ditimbulkan oleh HI dalam lingkup HN. Sehingga jika terjadi permasalahan yang masih ke dalam lingkup yuridiksi nasional, maka kita dapat menggunakan HN terlebih dahulu
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan penyelesaian sengketa internasional!
- = salah satunya yaitu kasus Iraq v Kuwait, yaitu invasi Iraq ke Kuwait yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Iraq setelah perang delapan tahun dengan Iran. Iraq sangat membutuhkan petro dollar sebagai pemasukan ekonominya sementara dikarenakan rendahnya harga petro dollar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumayla, Kuwait membantu Iraq dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis, dan Iraq mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.
- Penyelesaiannya yaitu Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta AS untuk tidak mengambil serangan balasan atas Iraq untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Dan pada 27 Februari 1991 pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush dan menyatakan perang telah selesai.³

³ Contoh Sengketa Internasional. Scribd. <https://www.scribd.com/doc/288441284/Contoh-Sengketa-Internasional>